



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) memuat capaian makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta inovasi daerah tahun 2023.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun. Adapun ringkasan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait

lainnya dalam pembangunan nasional. Disamping itu, Indikator kesejahteraan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan, dalam hal ini ketercapaian tujuan fiskal. Indikator kesejahteraan antara lain berupa indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan (antara lain tingkat pengangguran). Selain itu indikator ekonomi makro lainnya yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian suatu daerah berupa besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan, Struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita, gini ratio serta Inflasi. Disamping fungsinya sebagai alat penilaian keberhasilan pembangunan atau menganalisis tingkat keberhasilan suatu kebijakan fiskal, indikator ini juga dapat digunakan untuk membantu menggali dan memahami konteks regional dalam analisis perekonomian regional.

Gambaran capaian kinerja makro Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	64,93	65,79	0,86
2.	Angka Kemiskinan	10,75	11,77	1,02
3.	Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	3,49	3,79	0,3
4.	PDRB Berlaku (jutaanrph)	5.643.376,2	6.062.050,8	418.674,6
5.	PDRB Konstan (jutaanrph)	3.582.879,3	3.695.629,3	112.750,0
6.	Pertumbuhan Ekonomi	1,71	3,15	1,44
7.	Pendapatan Perkapita	-	-	-
8.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	-	-
9.	Inflasi (Kota Maumere)	6,25	3,33	-2,92

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kemajuan pembangunan sumber daya manusia yang terus menjadi perhatian pemerintah, karena sumber daya manusia merupakan aset yang memiliki peranan cukup besar dalam pembangunan suatu daerah. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut standar United Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-69 kategori sedang, serta IPM <60 kategori rendah. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 nilai IPM Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan sebesar 0,71%, dan pada tahun 2023 IPM Kabupaten Flores Timur meningkat lagi sebesar 65,79 % atau meningkat 0,86 %. Dibanding dengan tahun 2022 mengalami peningkatan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Flores Timur terus berusaha ditingkatkan.
2. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan yang digunakan adalah Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Basic Need Approach*). Definisi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK terbagi menjadi 2 yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dari tahun ke tahun, besaran nilai GK terus mengalami kenaikan karena adanya pengaruh kenaikan harga komoditi. GK Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023, 11,77% (Rp 405.486) mengalami kenaikan sebesar 1,02 % dibanding GK tahun sebelumnya

2022, 10,75% (Rp 364,117). Hal ini disebabkan oleh Garis Kemiskinan yang mengalami kenaikan dan dialami oleh hampir semua kabupaten kota diseluruh Indonesia.

3. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, permasalahan utama dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Permasalahan pengangguran memiliki dampak pada kerawanan sosial dan keamanan. Fenomena pengangguran menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*lexcess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lowongan yang tersedia. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya angka TPT mencerminkan tingkat kegagalan penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebesar 3,79%, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,30% setelah TPT tahun 2022 sebesar 3,49%.
4. Gambaran perekonomian suatu daerah atau wilayah biasanya diukur dengan mengetahui besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Atau dengan kata lain PDRB adalah Nilai Tambah Bruto yang dibentuk akibat aktifitas ekonomi yang terjadi disuatu wilayah tanpa melihat kepemilikan faktor produksi pada satu kurun waktu tertentu. Perhitungan PDRB ada 2 pendekatan yaitu atas dasar Harga Berlaku (untuk mendapatkan gambaran struktur perekonomian) dan atas dasar Harga Konstan (untuk mendapatkan angka Pertumbuhan Ekonomi). Struktur perekonomian merupakan kontribusi atau peran dari setia sektor atau kategori lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sedangkan Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi secara riil dari masing-masing sektor atau lapangan usaha. PDRB kabupaten Flores Timur atas dasar Harga Berlaku tahun 2023 sebesar Rp. 6.062.050.800.000,- (enam triliun enam puluh dua milyar

delapan ratus rupiah) naik 7,42 % dibanding dengan tahun 2022. Sedangkan PDRB atas dasar harga Konstan 2023 sebesar Rp.3.695.629.300.000.- (tiga triliun enam ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) naik 3,15% dibanding tahun 2022. Struktur perekonomian kabupaten Flores Timur tahun 2023 masih didominasi oleh 3 sektor yang tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun yaitu sektor Pertanian sebesar 29,04 %, sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 16,70 % dan sektor Jasa Pendidikan sebesar 15,25 %. Pertumbuhan ekonomi Flores Timur tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,15 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,71%. Sedangkan Pendapatan per kapita tidak dapat diperoleh angkanya karena sulit dilakukan perhitungan akibat data dasar tentang pajak tidak langsung netto dan penyusutan barang modal yang digunakan oleh masing-masing sektor ekonomi sulit diperoleh. Demikian juga dengan data Gini ratio, karena kecilnya sampel yang tercakup dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengestimasi data ini maka data yang Gini Ratio hanya bisa diestimasi untuk angka propinsi saja.

5. Inflasi merupakan perubahan dari Indeks Harga akibat kenaikan harga. Untuk bisa melakukan perhitungan inflasi harus memiliki data Nilai Konsumsi Dasar dari semua basket komoditas yang tercakup dalam kelompok perhitungan inflasi. Nilai Konsumsi Dasar untuk setiap komoditas hanya dapat diperoleh melalui Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh BPS, dan khusus untuk Propinsi NTT sampel SBH pada tahun 2022 hanya ada di 3 (tiga) kota yaitu Kota Kupang, Waingapu dan Maumere. Karena itu sesuai petunjuk pusat bahwa kota-kota lain dapat menggunakan data inflasi di kota terdekat dengan asumsi bahwa perubahan kenaikan harga di kota tersebut hamper sama dengan kota inflasi, karena itu kabupaten Flores Timur dapat menggunakan angka inflasi kota Maumere sebagai rujukan.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian kinerja pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan yakni urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan urusan Sosial.

1. URUSAN PENDIDIKAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan 4 (empat) indikator yang dinilai yakni:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	86,84 %	87,60 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,64 %	93,60 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	82,51 %	79,18 %
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	35,18 %	85,71 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp.310.027.405.155'-dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program:

Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Dasar
- Pendidikan Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraa

3. Program:

Pengembangan Kurikulum

Kegiatan:

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

4. Program:

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan:

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

- Sekolah - Sekolah Negeri
- Urusan Pemuda Dan Olahraga

5. Program:

Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan:

- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota

6. Program:

Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi

7. Program:

Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah belum terlaksana dengan baik, sehingga data base kependudukan yang terintegrasi dengan data Pendidikan belum tersedia.
- b. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen PNS yang menangani urusan pendidikan terhadap penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan.

2. URUSAN KESEHATAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,005 %	0,48 %
2	Prosentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	100 %
3	Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,9 %	83,92 %
4	Prosentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,5 %	99,76 %
5	Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	98,51 %
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98,8 %	98,84 %
7	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48,78 %	62,70 %
8	Prosentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	31,94 %	51,98 %
9	Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,88 %	71,77 %
10	Prosentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 %	66,31 %

11	Prosentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77,89 %	100 %
12	Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	211,9 %	97,81 %
13	Prosentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	69,69 %	100 %
14	Prosentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	77,18 %	89 %

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp.113.165.826.299,- dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program:

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

3. Program:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan :

- Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program:

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Kegiatan :

- Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga

5. Program:

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan :

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada halaman berikut:

Urusan Kesehatan	Permasalahan
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan bumil yang belum maksimal 2. Kurangnya Informasi masyarakat terkait pelayanan Antenatal 3. Akses ke Fasyankes yang sulit
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu bersalin mendapat pelayanan bukan oleh nakes dana tau tidak di fasyankes 2. Akses ke fasyankes sulit 3. Kendala biaya 4. Social budaya
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir 2. Akses ke fasyankes sulit 3. Social budaya
4. Pelayanan Kesehatan Balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir 2. Akses ke fasyankes sulit 3. Sosial Budaya
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sasaran yang tidak diketahui
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sasaran yang tidak diketahui 2. Kurangnya informasi tentang pelayanan ini
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sasaran yang tidak diketahui 2. Kurang Informasi tentang kegiatan ini
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan penderita yang sedikit
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan penderita yang sedikit
10. Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan terhadap penanganan pasien

Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	1. Penemuan kasus yang kurang.
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	1. Penemuan kasus yang kurang

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	0 %	0 %
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	100 %	0 %
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0%	31,50 %
4	Prosentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	41,90 %	49,32 %
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	16,06 %	20,80 %
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100 %	31,41 %
7	Tingkat Kemantapan jalan Kab/Kota	69,65 %	73,59 %
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0 %	0 %
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp.53.245.787.228,-dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program:

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program:

Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Kegiatan :

- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program:

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program:

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program:

Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

6. Program:

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan :

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Flores Timur yang meliputi 19 kecamatan dengan kondisi geografis berkontur.
- b. Kondisi sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan jaringan yang kurang memadai.
- c. Jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan jumlah penduduk yang harus dilayani juga semakin meningkat.
- d. Terbatasnya jumlah SDM terutama bidang teknik yang bertugas di lapangan.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelola dan memelihara Sarana dan Prasarana yang ada.
- f. Kurang/terbatasnya anggaran yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun

2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	0 %	0 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	0 %	0 %
3	Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	0 %	0 %
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	38,75 %	36 %
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan Utilitas umum)	0,40 %	0,040 %

Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp.5.515.524.884,- dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program :
- Kawasan Permukiman
- Kegiatan:
- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha
3. Program :
- Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Kegiatan:
- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
4. Program :
- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- Kegiatan:
- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program :
- Retribusi Tanah,Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- Kegiatan:
- Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Renstra SKPD belum sepenuhnya memuat program dan kegiatan yang berdasarkan Program kegiatan SPM. Ada beberapa program kegiatan SPM secara pelaporan ada di Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan tetapi pelaksanaannya ada di Dinas atau Instansi lain.

- b. Kebutuhan masyarakat lebih tinggi ketimbang ketersediaan dana APBD.

5. URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	25 %	100 %
2	Prosentase perda dan perkara yang ditegakan	100%	0%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0	100 %
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagan terhadap bencana	0	100 %
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3 orang	25 orang
6	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	90 %
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14 menit	8,8 menit

B. Realisasi Belanja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Trantibumlinmas dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yakni :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja, dan
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Realisasi belanja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tahun 2023, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebesar Rp.4.325.610.771,- dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan:

- Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program :

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- Penanganan Gangguan Kantrantibum.
- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

3. Program :

Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan :

- Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

- Realisasi belanja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tahun 2023, yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebesar Rp.3.197.442.855,- dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. Program :

Penanggulangan Bencana

Kegiatan :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

➤ Sub Urusan Bencana

- a. Belum adanya pemangkuan anggaran untuk pengambilan data pada daerah rawan bencana serta jumlah warga Negara by Name,by Adres pada lokasi rawan bencana.
- b. Fasilitas dalam penanggulangan bencana masih sangat kurang.
- c. Pengembangan sumber daya aparatur dalam misi penanggulangan bencana masih sangat kurang
- d. Masih banyak kegiatan yang mendukung SPM yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

- Sub Urusan Kebakaran
 - a. Belum maksimalnya peran Masyarakat dan Anggota Linmas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Masih kurangnya koordinasi lintas SKPD dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dapat ditunjukkan dengan Ketika terjadi persoalan baru melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Terbatasnya jumlah personil anggota SATPOLPP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan PERDA belum bisa optimal;
 - d. Penegakan Peraturan Daerah dan Preraturan Bupati belum optimal, temuan di lapangan pada saat operasi:
 - e. Pelanggaran terhadap Peraturan daerah masih sering terjadi;
 - f. Disiplin PNS belum optimal;
 - g. Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan komitmen SDM Sat.Pol.PP untuk mewujudkan kualitas para Penegak Perda dan memantapkan Kelembagaan Instansi Sat.Pol.PP;
 - h. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pada bidang data dan informasi;
 - i. Sebagian Masyarakat belum taat melaksanakan Peraturan daerah (PERDA) terutama yang ada kaitan dengan PAD;
 - j. Penanggulanganb Bencana terutama kebakaran masih belum terlalu optimal karena masih kurangnyajumlah personalisme aparat pemadam kebakaran.

6. URUSAN SOSIAL

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	88,12 %	16,63 %
2	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp. 4.107.716.930,-dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program :

Penanganan Bencana

Kegiatan :

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Sosial di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS belum dilakukan secara maksimal
- b. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan dan penanganan PMKS;
- c. Ketersediaan SDM penggerak yang terbatas;
- d. Sarana dan prasarana penunjang masih sangat terbatas;
- e. Koordinasi lintas sektor baik dinas maupun aparat desa dan masyarakat belum berjalan dengan baik.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. Hasil EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Dan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022, Kabupaten Flores Timur mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2.1217 dengan status kinerja Rendah.

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Nomor: 189.A/LHP/XIX.KUP/06/2023

Kabupaten Flores Timur berhasil mendapatkan Opini WAJAR Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 yang berarti Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (Audited/Unaudited) Realisasi Pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.1.137.452.779.985,- (97,99%) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mencapai Rp.1.064.277.989.377,- (87,62%).

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	51.683.481.652	44.811.599.749	86,70
4.2	Pendapatan Transfer	1.096.229.516.701	1.083.686.377.766	98,86
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.880.770.680	8.954.802.470	69,52

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1	Belanja Operasi	821.445.764.273	708.554.272.232	86,26
5.2	Belanja Modal	128.870.503.777	95.642.590.188	74,22
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.518.234.437	518.234.437	11,47
5.4	Belanja Transfer	259.874.808.245	259.562.892.520	99,88

5. INOVASI DAN PENGHARGAAN DAERAH

A. INOVASI DAERAH

Pembangunan di era globalisasi mengedepankan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Percepatan pembangunan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat diperlukan strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif dan efisien serta didukung dengan kreativitas dan inovasi. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa tujuan inovasi daerah adalah peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. Inovasi Daerah menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan produktivitas untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan daya saing daerah di tahun 2023. Selain itu, inovasi daerah juga menjadi sarana untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berikut beberapa inovasi daerah yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten

Flores Timur dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tahun 2023, yakni sebagai berikut:

1. Go Cinta 2H2

Inovasi Go Cinta 2H2 merupakan upaya perpaduan inovasi yang telah digagas sebelumnya yakni *Gerobak Cinta* dan *2H2 Center*. Pengembangan inovasi dengan mengedepankan aspek pemberdayaan dan kemandirian keluarga serta melibatkan semua *stakeholders* untuk mengatasi *Stunting* serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Gerobak cinta yang dimaksudkan adalah gerobak yang berisikan makanan bergizi untuk mencukupi nutrisi anak dengan memanfaatkan potensi makanan lokal, yang selanjutnya didorong dengan penuh cinta kasih secara khusus oleh keluarga dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan generasi Flores Timur yang sehat, cerdas dan produktif.

2. BAPEDA (Bapak Peduli Anak)

Inovasi yang menggagas peningkatan peran Bapak/Ayah dalam mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui kerja sama keluarga (Bapak dan Mama), tenaga kesehatan, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menurunkan angka *stunting* dan angka gizi kurang bagi Balita.

3. Teras Baca

Teras baca merupakan komunitas bersama untuk menyiapkan tempat belajar dan bermain bagi anak-anak PAUD dan siswa-siswi SD/SMP/SMA diluar jam sekolah. Inovasi digagas dengan konsep pemberdayaan yang melibatkan kaum muda, para guru, tenaga kesehatan, orang tua dan pemerintah untuk memberikan edukasi seperti budaya literasi, kesehatan, lingkungan, sosial dan toleransi.

4. NONA SARI SETIA (No Nasi Satu Hari, Sehat Bahagia dan Aman)

Dalam menghadapi masalah inflasi (naiknya harga barang) Flores Timur, Pemerintah menggagas inovasi Nona Sari Setia yakni

gerakan sehari tanpa nasi pada setiap hari Jumat untuk mengganti pangan di rumah jangan menggunakan nasi. Hal ini merupakan langkah konkret untuk menekan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi nasi (beras). Masyarakat dapat memanfaatkan pangan lokal lain (seperti singkong, pisang, jagung dan sorgum) yang diolah untuk dikonsumsi sebagai pengganti nasi/beras.

5. KRIS BEL (Kelurahan Wisata Balela)

Kolaborasi antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam memanfaatkan potensi pariwisata dalam wilayah kelurahan yakni taman kota Felix Fernandez dan Pante Uste, yang tidak hanya sebagai tempat rekreasi tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Destinasi wisata tersebut dikelola secara baik oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sebagian besar dari kaum millennial, yang didukung dengan program-program pemberdayaan dan pembangunan pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dengan demikian, potensi daerah (pariwisata) tersebut dapat dikelola secara baik dan berkelanjutan dengan pola pemberdayaan yang memberi ruang terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain mengembangkan beberapa inovasi di atas, Pemerintah Daerah juga berupaya menumbuhkan budaya inovasi pada seluruh elemen masyarakat, melalui kegiatan lomba inovasi daerah dalam bidang pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan. Beberapa inovasi terbaik tahun 2023 yang memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Inovasi KB Mobile

Inovasi KB Mobile merupakan upaya pendekatan yang dilakukan oleh para Bidan secara langsung kepada masyarakat khususnya

pada Pasangan Usia Subur (PUS). Inovasi ini digagas oleh Puskesmas Nagi dengan tujuan untuk meningkatkan prevalensi peserta KB modern, meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) MKJP serta mampu menurunkan angka *Unmet need* (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) di wilayah Kecamatan Larantuka.

2. SINKOR (Simpul Kreasi Nusantara)

SINKRON bergerak dalam bidang pendidikan, literasi, budaya, wisata, kepemudaan dan digitalisasi. Inovasi yang digagas dari komunitas pemerhati Pendidikan di kecamatan Larantuka, yang memiliki konsep bahwa dalam pengembangan pendidikan melalui pelaksanaan program perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak sehingga terciptanya ruang untuk berbagi gagasan dan karya, *networking* dan pembelajaran dan pengembangan keterampilan sosial.

3. Pasar Barter

Konsep inovasi yang digagas oleh kelompok perempuan kepala keluarga (Pekka) Lodan Doe yang berpusat di Kecamatan Kelubagolit, dengan menghidupkan kembali pasar barter di setiap desa wilayah kerja kelompok. Melalui budaya komunikasi Lamaholot, negosiasi dan toleransi antar anggota serikat Pekka dan memanfaatkan hasil produksi pertanian dan pengolahan sumber daya lokal anggota, diharapkan dapat membantu anggota serikat Pekka dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi keluarga.

4. Revolusi Pertanian

Pemerintah Desa Gekeng Deran (Kecamatan Tanjung Bunga) bersama masyarakat berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki (jagung, mete, kacang tanah dan kelapa), dengan tujuan selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga

meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi masyarakat. Upaya revolusi pertanian dilakukan dengan (1) menggairakan Kembali Semangat Bertani bagi Masyarakat; (2) membangun konsep pertanian secara *cluster* (bersifat kawasan); dan (3) meningkatkan akses pasar yang berkelanjutan.

5. Brand Si A'O

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, kelompok UMKM orang muda di kecamatan Witihama menggagas Brand Si A'O dengan fokus pada peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan memperkuat jaringan pemasaran produk. Singkong dan jagung hasil pertanian diolah menjadi kripik dan jagung titi Honihama, yang selanjutnya dipasarkan/promosi dengan memanfaatkan media sosial. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada petani/masyarakat akan pentingnya meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, yang dapat berdampak pada kesejahteraan petani.

6. Madu Hutan Flores Timur

Inovasi yang dilakukan oleh Petani Madu di Desa Leraboleng (Kecamatan Titehena) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani madu. Inovasi ini dilatar belakangi karena banyaknya produksi Madu Hutan di wilayah Leraboleng dan warisan nenek moyang untuk memanjat dan memanen madu. Hampir sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani muda, namun proses panen dan penjualan yang dilakukan masih tergolong sederhana sehingga berdampak pada kualitas dan nilai jual madu hutan. Sehingga konsep inovasi yang dilakukan adalah dengan peningkatan teknik panen dan pengolahan pasca panen secara lebih profesional dan berkualitas. Pemasaran diubah dari menggunakan botol bekas menjadi motol kemasan yang dilengkapi dengan brand, dan dipasarkan melalui pendekatan langsung, pameran dan promosi melalui media online.

B. PENGHARGAAN

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2023 mendapatkan apresiasi dari Pemerintah tingkat atas dan masyarakat. Beberapa penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah selama tahun 2023, yakni sebagai berikut:

1. Penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden atas kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menurunkan angka *stunting* pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wakil Presiden.
2. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (melalui Gubernur) atas kinerja dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* pada rapat koordinasi percepatan penurunan *stunting* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
3. Penghargaan dalam implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5H) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Flores Flores Timur Tahun 2023. Prestasi ini untuk kedua kalinya secara berturut-turut dan Kabupaten Flores Timur menjadi representasi Provinsi NTT di kancah nasional sebagai Kabupaten Peduli HAM. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 tingkat Provinsi.
4. Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai daerah Kabupaten/Kota terbaik ketiga tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan Dana Transfer.

5. Penghargaan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Flores Timur kepada Penjabat Bupati Flores Timur sebagai Bupati yang komunikatif dan cepat respon terhadap permasalahan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara puncak HUT ke 78 PGRI Tingkat Kabupaten Flores Timur.

6. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah merupakan gambaran capaian kinerja selama 1 (satu) tahun dan disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember 2023 Tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Laporan ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan capaian kinerja maupun seluruh permasalahan yang menghambat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Flores Timur adalah tanggung jawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah di dalam koordinasi Kepala Daerah.

Harapan kami, RLPPD ini bisa menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Semoga, hasil evaluasi tersebut bisa memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat dikarenakan keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh warga masyarakat

Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan daya kritis dan dukungan yang lebih besar terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam menghadapi tantangan serta permasalahan yang muncul dimasa datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita semua.

Larantuka, 26 Maret 2024.

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Flores Timur. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN FLORES TIMUR'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the stamp, the name 'DORIS ALEXANDER RIHI' is printed in bold, black, uppercase letters.

DORIS ALEXANDER RIHI